

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian Penelitian Terdahulu merupakan proses untuk membandingkan dan mengevaluasi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta memperkuat orisinalitas penelitian yang sedang dilakukan. Kajian ini juga dapat memberikan referensi dalam menentukan landasan teori dan metode penelitian yang relevan.

Kajian Penelitian Terdahulu juga merupakan sebuah upaya peneliti untuk menemukan inspirasi baru di dalam penelitian, sehingga dapat membantu peneliti untuk memposisikan penelitian, serta menunjukkan keaslian dari penelitian. Maka dari itu, dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil dari Kajian Penelitian Terdahulu, sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian dari Aulia dan Suryadi (2020)

Hasil penelitian ini berjudul “Agroindustrialisasi Kopi Arabika Java Preanger di Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung”. Penelitian tersebut menggunakan Teori agroindustri dan pengembangan nilai tambah produk pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan agroindustri kopi mampu meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan pascapanen dan diversifikasi produk. Selain itu, agroindustrialisasi juga

dinilai mampu meningkatkan daya saing kopi lokal. Namun demikian, penelitian ini belum membahas peran pemerintah dalam pemberdayaan pelaku usaha kopi.

2. Hasil Penelitian Dari Setiawan (2024)

Hasil penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi di Desa Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung”. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan yang menekankan pada peran pemerintah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan dalam memberikan pembinaan, fasilitasi, serta dukungan kepada petani kopi. Namun, peran tersebut masih terbatas pada lingkup pemerintahan desa dan belum mencakup keterlibatan perangkat daerah secara lebih luas.

3. Hasil penelitian dari Sumartini (2021)

Hasil penelitian ini berjudul “Tradisi Budidaya Kopi Organik Gunung Puntang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan fokus pada konsep budaya dan kearifan lokal dalam budidaya kopi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik budidaya tradisional yang dilakukan oleh masyarakat memiliki kontribusi besar terhadap kualitas kopi Puntang. Selain itu, nilai budaya yang melekat pada proses produksi menjadi salah satu kekuatan dalam mempertahankan karakteristik kopi. Namun, penelitian ini

tidak membahas aspek pemberdayaan maupun strategi pengembangan usaha secara kelembagaan.

4. Hasil Penelitian dari Supriatna (2023)

Hasil penelitian ini berjudul “Pengembangan Agroindustri Kopi Arabika yang Berkelanjutan di Kabupaten Bandung”. Penelitian ini menggunakan teori pembangunan berkelanjutan dan konsep agribisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kopi memerlukan integrasi antara produksi, pengolahan, dan pemasaran untuk mencapai keberlanjutan. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, menjadi faktor penting dalam pengembangan agroindustri kopi. Meskipun demikian, penelitian ini belum secara spesifik mengkaji strategi pemberdayaan oleh instansi pemerintah daerah.

5. Hasil Penelitian dari Wibowo (2025)

Hasil penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Petani Kopi melalui Penguatan Kelembagaan”. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan petani dapat meningkatkan posisi tawar, akses terhadap pasar, serta kemampuan dalam mengelola usaha. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan petani dan belum membahas secara mendalam peran pemerintah daerah dalam merancang strategi pemberdayaan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan dan Persamaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Aulia, M. R., & Suryadi, A. (2020)	Agroindustrialisasi Kopi Arabika Java Preanger di Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung	Teori Agroindustri, Nilai Tambah	Kualitatif	Deskriptif	Analisis deskriptif
2.	Setiawan, R. (2024)	Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi di Desa Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung	Teori Pemberdayaan Masyarakat	Kualitatif	Deskriptif	Analisis deskriptif

3.	Sumartini, T. (2021)	Tradisi Budidaya Kopi Organik Gunung Puntang	Teori Budaya dan Pemberdayaan Lokal	Kualitatif	Etnografi	Analisis kualitatif
4.	Supriatna, E. (2023)	Pengembangan Agroindustri Kopi Arabika yang Berkelanjutan di Kabupaten Bandung	Teori Pembangunan Berkelanjutan, Agroindustri	Kualitatif	Deskriptif	Analisis deskriptif
5.	Wibowo, A. (2025)	Pemberdayaan Petani Kopi melalui Penguatan Kelembagaan	Teori Pemberdayaan, Kelembagaan	Kualitatif	Deskriptif	Analisis deskriptif

Sumber: Oleh Peneliti (2026)

Berdasarkan tabel kajian penelitian terdahulu sebagian besar berfokus pada aspek agroindustri, budaya, serta pemberdayaan masyarakat pada tingkat lokal dan kelembagaan. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji strategi pemberdayaan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan pemasaran Kopi Java Preanger Puntang, masih

terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji strategi pemberdayaan dari perspektif administrasi publik yang berfokus pada peran perangkat daerah dalam pengembangan produk unggulan lokal.

Penelitian ini memiliki fokus pada Strategi Pemberdayaan Kopi Java Preanger Puntang Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bandung, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang berbeda dari penelitian sebelumnya serta memperkaya kajian dalam bidang administrasi publik khususnya terkait peran pemerintah daerah dalam pengembangan produk unggulan daerah.

2.1.2 Kajian Terhadap *Grand Theory*

2.1.2.1 Konsep Organisasi

Organisasi merupakan suatu wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam organisasi terdapat pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta koordinasi antaranggota agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Organisasi menjadi salah satu unsur penting dalam administrasi publik karena menjadi sarana bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Chester I. Barnard (1938), organisasi merupakan suatu sistem kerja sama antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan bersama. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya terdiri atas individu-individu, tetapi juga adanya koordinasi dan kerja sama yang saling mendukung dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2017), organisasi adalah suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, memiliki batasan yang jelas, serta berfungsi secara

berkesinambungan untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi tersebut menekankan bahwa organisasi memiliki struktur yang jelas sehingga setiap anggota memiliki peran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Sondang P. Siagian (2014), organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui pembagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan kerja yang jelas. Organisasi menjadi alat bagi administrasi dalam mengimplementasikan kebijakan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Dalam perspektif administrasi publik, organisasi publik memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah sekaligus penyelenggara pelayanan publik. Organisasi publik dituntut mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan suatu organisasi publik tidak hanya diukur dari pencapaian target program, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Penelitian ini berkaitan dengan organisasi publik karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan, termasuk melaksanakan strategi pemberdayaan pelaku usaha kopi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, organisasi menjadi landasan penting dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan yang menjadi fokus penelitian ini.

2.1.2.2 Konsep Administrasi

Administrasi merupakan suatu proses kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Administrasi tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pencatatan atau

ketatausahaan, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, administrasi menjadi dasar dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta.

Menurut Sondang P. Siagian (2014), administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa administrasi merupakan suatu proses yang membutuhkan kerja sama, pembagian tugas, serta koordinasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

Menurut The Liang Gie (2009), administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi tersebut menunjukkan bahwa administrasi tidak hanya berfokus pada aspek tata usaha, tetapi juga mencakup pengelolaan seluruh sumber daya organisasi agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Menurut William H. Newman (1963), administrasi merupakan bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Pendapat ini menekankan bahwa administrasi tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen, karena keberhasilan organisasi dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam mengarahkan serta mengoordinasikan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Dalam perkembangannya, administrasi memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai fungsi organisasi. Melalui administrasi yang baik, setiap program dan kebijakan pemerintah dapat direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi secara sistematis sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam konteks penelitian ini, konsep administrasi menjadi landasan untuk memahami bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung menjalankan fungsi organisasinya dalam merumuskan dan melaksanakan strategi pemberdayaan Kopi Java Preanger Puntang. Pelaksanaan strategi tersebut memerlukan proses administrasi yang baik, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, koordinasi dengan berbagai pihak, hingga evaluasi terhadap hasil program. Dengan demikian, administrasi menjadi dasar penting dalam mendukung keberhasilan strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

2.1.2.3 Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan salah satu cabang ilmu administrasi yang mempelajari proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan kegiatan birokrasi pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks pembangunan daerah, administrasi publik menjadi dasar penting dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Menurut Nicholas Henry (2015), administrasi publik merupakan kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik yang bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap hubungan pemerintah dengan masyarakat yang dilayani. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa administrasi publik tidak hanya membahas organisasi pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan proses pelayanan publik dan penyelesaian masalah masyarakat.

Menurut Chandler dan Plano (1988), administrasi publik merupakan proses pengorganisasian dan pengoordinasian sumber daya publik untuk melaksanakan kebijakan negara. Pendapat ini menunjukkan

bahwa administrasi publik berkaitan erat dengan pelaksanaan program pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Menurut Sondang P. Siagian (2014), administrasi publik merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam mencapai tujuan negara. Administrasi publik menjadi sarana pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik, pembangunan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya daerah.

Dalam perspektif administrasi publik, pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator pembangunan. Pemerintah daerah tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga harus mampu mendorong pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pembangunan ekonomi daerah.

Administrasi publik juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah mampu menciptakan pelayanan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut mampu mengelola sumber daya daerah secara optimal agar program pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, administrasi publik memiliki hubungan yang erat dengan proses pembangunan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, administrasi publik menjadi landasan penting dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibuat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam melaksanakan program secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai Strategi Pemberdayaan Kopi Java Preanger Puntang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung memiliki kaitan erat dengan administrasi publik karena membahas peran pemerintah daerah dalam

melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kopi lokal sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah.

2.1.3 Kajian Terhadap *Middle Theory*

2.1.3.1 Konsep Strategi

Strategi merupakan suatu rencana atau langkah yang digunakan organisasi dalam mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Strategi menjadi bagian penting dalam organisasi karena berkaitan dengan cara organisasi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai tujuan.

Menurut Stephanie K. Marrus (2002), strategi merupakan proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi. Strategi berkaitan dengan cara organisasi menentukan arah kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Hamel dan Prahalad (1995), strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental dan terus menerus yang dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan di masa depan.

Menurut Fred R. David (2011), strategi merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai organisasi. Strategi berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk menghadapi berbagai tantangan organisasi.

Dalam administrasi publik, strategi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pemerintah daerah. Strategi digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Strategi dalam organisasi publik juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memiliki strategi yang jelas agar program pembangunan dapat berjalan secara terarah dan memberikan hasil yang optimal. Penyusunan strategi yang tepat akan membantu pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai

tantangan pembangunan, termasuk dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi daerah.

Penelitian ini menggunakan konsep strategi karena membahas langkah dan upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dalam melaksanakan pemberdayaan pelaku usaha kopi Java Preanger Puntang.

2.1.3.2 Strategi dalam Administrasi Publik

Strategi dalam administrasi publik merupakan pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Strategi tidak hanya berkaitan dengan perencanaan, tetapi juga mencakup implementasi serta evaluasi kebijakan.

Menurut Rangkuti (2013), strategi merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki melalui analisis lingkungan internal dan eksternal. Dalam konteks pemerintahan, strategi diperlukan untuk mengatasi berbagai keterbatasan serta memaksimalkan potensi daerah.

Menurut John M. Bryson (2010), strategi dalam sektor publik merupakan pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, dan alokasi sumber daya yang mendefinisikan organisasi pemerintah.

Menurut Riant Nugroho (2017), strategi dalam administrasi publik berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menentukan langkah-langkah kebijakan untuk menyelesaikan masalah publik secara efektif.

Strategi dalam administrasi publik tidak hanya berorientasi pada pencapaian target program, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini, strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilihat dari bagaimana Disperindag:

- 1) merancang program pemberdayaan
- 2) mengimplementasikan kegiatan
- 3) menyesuaikan strategi dengan kondisi pelaku usaha kopi
- 4) merespons tantangan pemasaran

Dengan demikian, teori strategi membantu menjelaskan bagaimana proses pemberdayaan dilakukan, bukan hanya hasilnya.

2.1.3.3 Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pembangunan karena masyarakat tidak hanya dijadikan objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

Dalam konteks pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2017), pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mandiri dalam memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraannya. Pemberdayaan dilakukan melalui pengembangan kapasitas masyarakat, penguatan usaha, dan penguatan kelembagaan.

Menurut Jim Ife (2008), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat agar mampu menentukan masa depannya sendiri. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa

pemberdayaan bertujuan menciptakan masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing.

Menurut Robert Chambers (1997), pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang berpusat pada masyarakat dan bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Dalam penelitian ini, konsep pemberdayaan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2017) karena dinilai sesuai dengan fokus penelitian mengenai strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017), strategi pemberdayaan masyarakat terdiri atas empat dimensi, yaitu:

1. Bina Manusia, yaitu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan peningkatan keterampilan.
2. Bina Usaha, yaitu upaya mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha melalui peningkatan kualitas produk, akses permodalan, pemasaran, dan pengembangan usaha.
3. Bina Lingkungan, yaitu upaya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan usaha, baik lingkungan sosial, ekonomi, maupun lingkungan fisik sehingga masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan.
4. Bina Kelembagaan, yaitu upaya memperkuat organisasi, kelompok usaha, maupun kemitraan agar masyarakat memiliki kelembagaan yang mampu mendukung keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing.

Keempat dimensi tersebut saling berkaitan dalam menciptakan proses pemberdayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, teori Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato digunakan sebagai landasan operasional dalam menganalisis strategi pemberdayaan Kopi Java Preanger Puntang yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.

2.1.3.4 Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan merupakan langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Strategi pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan, tetapi mencakup berbagai upaya yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Strategi tersebut perlu disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat karena setiap masyarakat memiliki karakteristik, potensi, dan permasalahan yang berbeda. Dengan adanya strategi yang sesuai, proses pemberdayaan diharapkan dapat memberikan perubahan yang nyata terhadap kemampuan masyarakat dan tidak hanya menghasilkan kegiatan yang bersifat sementara.

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2017), strategi pemberdayaan dilakukan melalui proses pembelajaran masyarakat agar mampu mandiri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.

Menurut Jim Ife (2008), strategi pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam menentukan arah pembangunan.

Menurut Robert Chambers (1997), strategi pemberdayaan dilakukan melalui pembangunan yang berpusat pada masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan beberapa teori tersebut, strategi pemberdayaan dapat dipahami sebagai serangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran, partisipasi, pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi. Strategi tersebut diarahkan agar

masyarakat mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan secara bertahap mencapai kemandirian. Oleh karena itu, keberhasilan strategi pemberdayaan tidak hanya dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga dari perubahan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Strategi pemberdayaan juga membutuhkan adanya kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan kondisi masyarakat. Pemerintah perlu memahami permasalahan yang dihadapi sebelum menentukan bentuk pemberdayaan yang akan diberikan. Apabila kegiatan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka hasil yang diperoleh dapat menjadi kurang optimal. Sebaliknya, apabila strategi disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat, kegiatan pemberdayaan dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Oleh sebab itu, proses identifikasi kebutuhan menjadi bagian penting dalam menentukan strategi pemberdayaan. Pelaksanaan strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pelatihan, pendampingan, pembinaan, penyuluhan, pemberian informasi, serta fasilitasi akses terhadap sumber daya. Pelatihan dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan, sedangkan pendampingan diperlukan untuk membantu masyarakat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. Pembinaan dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan kemampuan masyarakat, sedangkan fasilitasi dapat membantu masyarakat memperoleh akses terhadap sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau. Berbagai bentuk kegiatan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

Dalam konteks kelembagaan, strategi pemberdayaan berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, dan kerja sama untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai peran penting karena memiliki kewenangan dalam menjalankan pelayanan dan pembangunan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Melalui perangkat daerah, pemerintah dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan mendukung pengembangan potensi daerah. Pemerintah dalam strategi pemberdayaan tidak hanya berperan sebagai pihak yang memberikan bantuan. Pemerintah juga berperan sebagai fasilitator, pembina, penghubung, dan pendukung masyarakat. Sebagai fasilitator, pemerintah membantu masyarakat memperoleh akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Sebagai pembina, pemerintah memberikan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas. Sebagai penghubung, pemerintah dapat membantu mempertemukan masyarakat dengan pihak lain yang dapat memberikan dukungan. Sementara itu, sebagai pendukung, pemerintah menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi yang dimiliki.

Peran tersebut menjadi penting karena dalam proses pengembangan potensi daerah masyarakat dapat menghadapi berbagai keterbatasan. Keterbatasan tersebut dapat berupa kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, akses informasi dan teknologi, pemasaran, maupun kelembagaan. Keterbatasan tersebut dapat menghambat masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki apabila tidak memperoleh dukungan yang sesuai. Oleh karena itu, strategi

pemberdayaan pemerintah perlu diarahkan untuk mengurangi berbagai keterbatasan tersebut melalui kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Strategi pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah juga harus mampu meningkatkan kemampuan masyarakat secara bertahap sehingga masyarakat tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Bantuan dapat menjadi salah satu bentuk dukungan dalam proses pemberdayaan, tetapi bantuan tersebut seharusnya digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah masyarakat mampu menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperoleh untuk mengembangkan kegiatan secara mandiri. Dengan demikian, pemberdayaan tidak menciptakan ketergantungan, tetapi mendorong masyarakat menjadi lebih mampu dalam mengelola potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan, partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor penting. Partisipasi dapat dimulai sejak proses mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi sehingga pemerintah mempunyai dasar dalam menentukan kegiatan yang sesuai. Partisipasi juga dapat dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti mengikuti pelatihan, pembinaan, maupun kegiatan pengembangan usaha. Setelah kegiatan selesai, masyarakat juga mempunyai peran dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil pemberdayaan.

Strategi pemberdayaan juga membutuhkan komunikasi dan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui perkembangan serta hambatan yang dihadapi masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai dukungan dan kegiatan yang dapat dimanfaatkan. Hubungan yang baik tersebut dapat membantu menciptakan proses pemberdayaan yang lebih terbuka dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan komunikasi yang baik, pemerintah juga dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan menentukan langkah selanjutnya. Dalam penelitian ini, Strategi pemberdayaan dalam pengembangan Kopi Java Preanger Puntang menjadi penting karena pelaku usaha dapat menghadapi berbagai permasalahan dalam mengembangkan usahanya. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dapat memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan produk. Keterbatasan akses informasi dan teknologi dapat menghambat pelaku usaha dalam mengikuti perkembangan pasar dan teknologi. Selain itu, keterbatasan akses pemasaran dapat menyebabkan produk sulit menjangkau pasar yang lebih luas. Permasalahan kelembagaan juga dapat memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam membangun kerja sama dan memperoleh dukungan.

Untuk melihat strategi pemberdayaan secara lebih menyeluruh, Mardikanto dan Soebiato menjelaskan empat upaya pemberdayaan yang saling berkaitan, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan. Keempat aspek tersebut digunakan untuk melihat proses pemberdayaan tidak hanya dari sisi peningkatan kemampuan manusia, tetapi juga dari sisi pengembangan usaha, lingkungan yang mendukung, dan penguatan kelembagaan. Keempat aspek tersebut saling melengkapi karena peningkatan kemampuan masyarakat akan lebih optimal apabila didukung dengan kondisi usaha, lingkungan, dan kelembagaan yang

memadai. Strategi pemberdayaan juga perlu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Efektivitas berkaitan dengan kesesuaian kegiatan pemberdayaan dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang tersedia secara tepat agar kegiatan dapat memberikan hasil yang optimal. Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap proses dan hasil kegiatan pemberdayaan. Sementara itu, keberlanjutan berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan hasil pemberdayaan dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, strategi pemberdayaan dalam penelitian ini dipahami sebagai serangkaian langkah yang dilakukan secara terencana oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian pelaku usaha Kopi Java Preanger . Strategi tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, pendampingan, fasilitasi, promosi, pengembangan pemasaran, serta penguatan kelembagaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelaku usaha. Dengan demikian, strategi pemberdayaan dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, tetapi juga dari bagaimana kegiatan tersebut mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan tersebut. Strategi pemberdayaan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha, mendukung pengembangan usaha, memperluas akses pemasaran, memperkuat kelembagaan, serta mendorong kemandirian pelaku usaha dalam mengembangkan potensi Kopi Java Preanger Puntang secara berkelanjutan.

2.1.4 Kajian Terhadap *Operational Theory*

2.1.4.1 Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik merupakan proses mengkaji kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik. Analisis kebijakan dilakukan untuk melihat efektivitas kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Menurut William N. Dunn (2003), analisis kebijakan publik merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menyelesaikan masalah publik.

Menurut Thomas R. Dye (2013), kebijakan publik merupakan apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Menurut Riant Nugroho (2017), kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat demi mencapai tujuan bersama.

Analisis kebijakan publik penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat karena berkaitan dengan efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Penelitian ini, analisis kebijakan publik digunakan untuk melihat strategi dan program pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dalam mendukung pengembangan usaha kopi Java Preanger Puntang.

2.1.4.2 *Good Governance*

Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurut Sedarmayanti (2009), *good governance* merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.

Menurut Mardiasmo (2009), *good governance* merupakan konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) (1997), *good governance* memiliki karakteristik partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum.

Konsep *good governance* berkaitan dengan penelitian ini karena strategi pemberdayaan pelaku usaha kopi memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik agar program pemberdayaan berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Penerapan prinsip *good governance* menjadi penting dalam pelaksanaan program pemerintah daerah karena berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Program pemberdayaan masyarakat memerlukan tata kelola yang baik agar mampu memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.

Melalui penerapan *good governance*, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini, prinsip *good governance* terlihat dari upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan usaha, serta pelayanan kepada pelaku usaha kopi secara efektif dan bertanggung jawab.

2.1.4.3 Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah melalui berbagai kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisor pembangunan. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menciptakan kebijakan, program, serta lingkungan yang mendukung pengembangan usaha masyarakat dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah menjadi penting karena pemerintah memiliki kewenangan dalam merancang kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan potensi daerah. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif agar masyarakat mampu mengembangkan usaha secara mandiri.

Menurut Mudrajat Kuncoro (2004), pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk menciptakan peluang ekonomi baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah juga menekankan pentingnya pemanfaatan potensi lokal sebagai basis pengembangan ekonomi wilayah.

Menurut Sjafrizal (2008), pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya daerah serta membentuk pola kemitraan untuk menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapat ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran sebagai penggerak pembangunan ekonomi melalui pengembangan potensi daerah.

Menurut Lincoln Arsyad (2010), pembangunan ekonomi daerah merupakan proses kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah memerlukan keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama.

Dalam perspektif administrasi publik, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan dinamisor

pembangunan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu membangun kerja sama dengan masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pihak terkait agar pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung memiliki peran dalam pembangunan ekonomi daerah melalui strategi pemberdayaan pelaku usaha kopi Java Preanger Puntang. Peran tersebut diwujudkan melalui program pembinaan usaha, pelatihan, promosi produk, serta pengembangan usaha masyarakat berbasis potensi lokal. Pengembangan usaha kopi sebagai salah satu produk unggulan daerah diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan memperkuat daya saing daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui strategi pemberdayaan yang berkelanjutan.

2.1.4.4 Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Pengembangan produk unggulan daerah merupakan salah satu strategi pembangunan ekonomi daerah yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal sehingga mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing wilayah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Produk unggulan daerah pada umumnya merupakan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibandingkan daerah lain, baik dari sisi ketersediaan sumber daya alam, kualitas produk, keunikan budaya, maupun dukungan kelembagaan yang dimiliki daerah tersebut.

Menurut Tambunan (2016), pengembangan produk berbasis potensi lokal merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sjafrizal (2008), pengembangan produk unggulan daerah berkaitan dengan pemanfaatan potensi lokal yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Mudrajat Kuncoro (2004), produk unggulan daerah merupakan produk yang memiliki keunggulan kompetitif dan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.

Dengan demikian, pengembangan produk unggulan daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup aspek pengolahan, pemasaran, hingga penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Kopi Java Preanger Puntang merupakan salah satu produk unggulan daerah Kabupaten Bandung yang memiliki kualitas dan daya saing tinggi. Pengembangan produk unggulan daerah memerlukan dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan, promosi, dan pengembangan usaha.

Produk unggulan daerah menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena mampu menciptakan identitas daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan produk unggulan juga dapat memperluas peluang usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam pengembangan produk unggulan daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pemasaran, serta mendukung promosi produk lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Penelitian ini berkaitan dengan pengembangan produk unggulan daerah karena membahas strategi pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan Kopi Java Preanger Puntang sebagai salah satu produk unggulan Kabupaten Bandung. Dimana pengembangan produk unggulan daerah berkaitan dengan strategi pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Bandung dalam mendukung pengembangan kopi Java Preanger Puntang sebagai produk unggulan daerah.

2.1.4.5 Kopi Java Preanger

Kopi Java Preanger merupakan salah satu kopi khas Jawa Barat yang memiliki nilai sejarah dan kualitas unggul. Istilah “*Java Coffee*” atau “*A Cup of Java*” dikenal luas sebagai sebutan bagi kopi dari Pulau Jawa yang berkembang sejak masa kolonial VOC. Dalam buku *Sejarah dan Tata Niaga Kopi* dijelaskan bahwa VOC berhasil mengembangkan budidaya kopi di wilayah Priangan dan menjadikan kopi Jawa sebagai salah satu komoditas penting di pasar dunia.

Perkembangan kopi di wilayah Priangan dimulai ketika VOC membawa bibit kopi ke Batavia pada tahun 1696 untuk memutus monopoli perdagangan kopi Arab. Setelah mengalami kegagalan awal, budidaya kopi kemudian berhasil dikembangkan di dataran tinggi Priangan yang memiliki kondisi geografis sesuai untuk tanaman kopi Arabika.

Keberhasilan budidaya kopi di Priangan menjadikan kopi Jawa sebagai salah satu komoditas ekspor utama VOC. Di dalam buku tersebut dijelaskan juga bahwa kopi dari Priangan berhasil menembus pasar Amsterdam dan menjadi standar kualitas kopi di pasar dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kopi Java Preanger memiliki nilai historis dan ekonomi yang sangat besar bagi perkembangan industri kopi Indonesia.

Menurut Aklimawati dkk. (2014), kopi Java Preanger merupakan salah satu kopi khas Jawa Barat yang memiliki kualitas dan karakteristik yang dipengaruhi oleh kondisi agroklimat, ketinggian tempat, serta pengelolaan budidaya.

Menurut Rahardjo (2012) menyatakan bahwa pengembangan kopi spesialti memerlukan dukungan pemerintah dan kelembagaan yang kuat agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha kopi.

Menurut Yusdja dan Ilham (2004), pengembangan komoditas unggulan daerah harus dilakukan melalui dukungan kebijakan pemerintah, peningkatan kualitas produk, penguatan pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kopi tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada strategi pemberdayaan dan pengembangan kapasitas pelaku usaha kopi.

Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah penghasil kopi Java Preanger yang cukup dikenal, khususnya dari kawasan Gunung Puntang. Kawasan ini memiliki kondisi geografis dataran tinggi yang mendukung produksi kopi Arabika berkualitas tinggi. Bahkan Kopi Puntang pernah memperoleh pengakuan internasional dalam ajang *Specialty Coffee Association of America* (SCAA), sehingga semakin memperkuat posisi kopi Puntang sebagai bagian dari kopi spesialti Indonesia.

Dalam konteks administrasi publik, pengembangan Kopi Java Preanger Puntang tidak hanya berkaitan dengan pengembangan produk unggulan daerah, tetapi juga berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam melaksanakan strategi pemberdayaan pelaku usaha kopi melalui pembinaan, pelatihan, promosi, dan penguatan kelembagaan usaha kopi agar mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

2.2 Kerangka Pemikiran

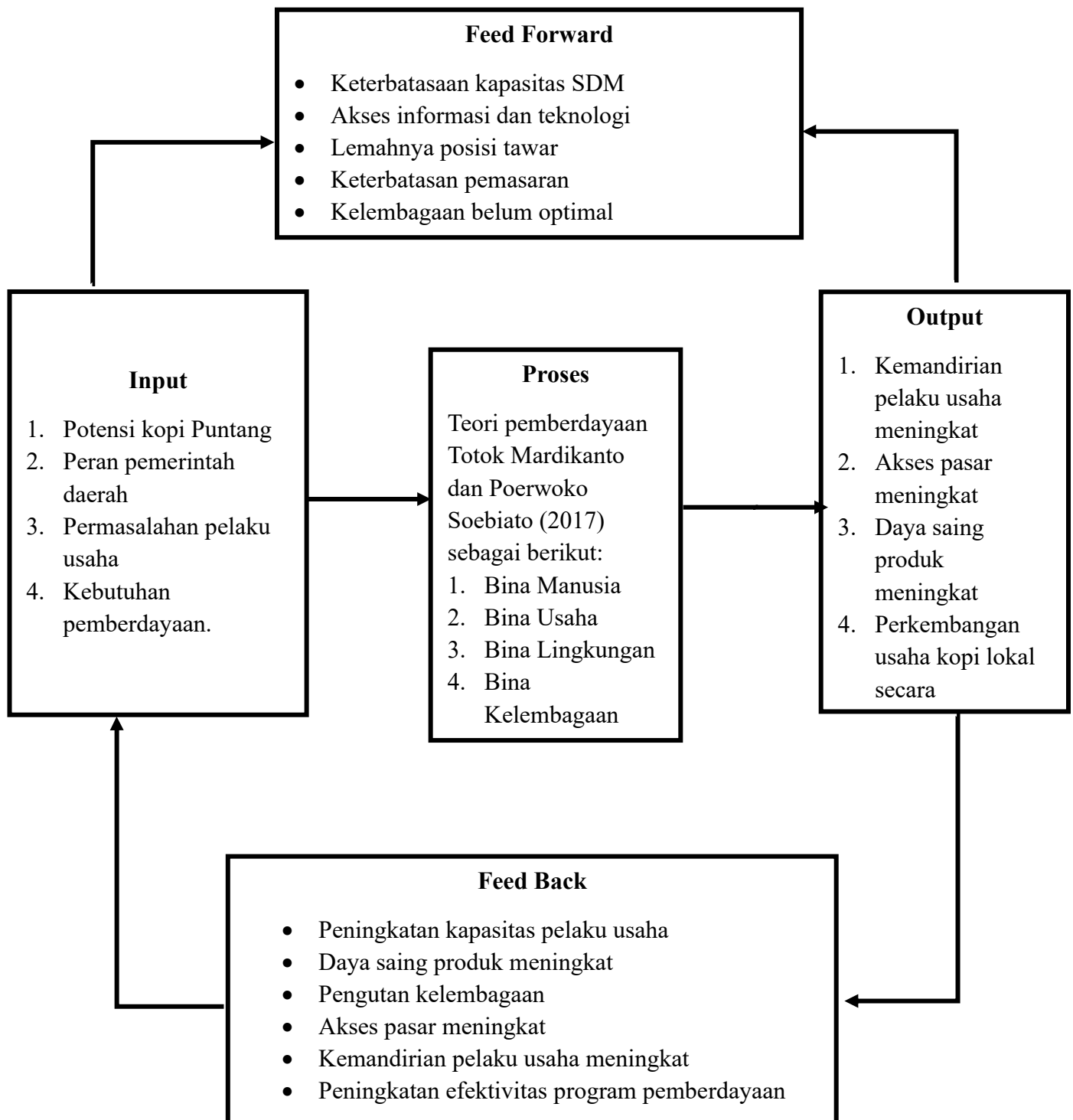
Penelitian mengenai strategi pemberdayaan Kopi Java Preanger Puntang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dilatarbelakangi oleh adanya potensi besar kopi sebagai produk unggulan daerah yang belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan dan kemandirian pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan akses informasi dan teknologi, serta lemahnya kelembagaan pelaku usaha kopi.

Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2017) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengembangan kapasitas masyarakat agar mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Teori tersebut terdiri atas empat dimensi, yaitu:

1. **Bina Manusia**, berkaitan dengan upaya pemberdayaan yang berfokus untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas pelaku usaha kopi melalui pembinaan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Dimensi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan teknis, dan kompetensi pelaku usaha agar mampu mengelola usahanya secara lebih profesional dan produktif.
2. **Bina Usaha**, berkaitan dengan upaya pemberdayaan yang diarahkan pada pengembangan dan penguatan kegiatan usaha agar dapat tumbuh dan bersaing di pasar. Dimensi ini mencakup peningkatan kualitas produk, pengembangan inovasi, perluasan akses pemasaran, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing usaha.

3. **Bina Lingkungan**, berkaitan dengan upaya menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung berkembangnya usaha secara berkelanjutan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun kebijakan. Dimensi ini menekankan pentingnya dukungan berbagai pihak dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga pelaku usaha dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan lebih optimal.
4. **Bina Kelembagaan**, berkaitan dengan upaya pemberdayaan yang berfokus pada penguatan organisasi, kelompok usaha, serta jaringan kerja sama yang mendukung pengembangan usaha. Dimensi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam mengelola kegiatan usaha, membangun koordinasi, serta memperluas kemitraan dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Agar kerangka berfikir diatas dapat lebih jelas dan lebih mudah dipahami, peneliti mencoba menggambarkan kerangka berpikir kedalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.3 Proposisi

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka proposisi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dalam pengembangan Kopi Java Preanger Puntang dapat berjalan dengan baik apabila dilaksanakan melalui bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan secara efektif dan berkelanjutan.
2. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha Kopi Java Preanger Puntang dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pelatihan, pendampingan, pengembangan usaha, perluasan akses pemasaran, serta penguatan kelembagaan.
3. Pelaksanaan strategi pemberdayaan Kopi Java Preanger Puntang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat.